PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. DAFTAR : 1679/per-umP/2013
TANGGAL : 14-3-2013

# ANALISIS MEKANISME PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG

## SKRIPSI

OLEH

NAMA : Zulfa Nanda Sari

NIM : 22 2007 258 K

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2010

# ANALISIS MEKANISME PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG

## SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi


**OLEH**

**NAMA : Zulfa Nanda Sari**

**NIM : 22 2007 258 K**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**
**FAKULTAS EKONOMI**


**2010**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulfa Nanda Sari

NIM : 22 2007 258 K

*Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh – sungguh dan* tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

**Palembang, Agustus 2010**

METERAI TEMPEL
26839AAF206995251
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

**Zulfa Nanda Sari**

**Fakultas Ekonomi**
**Universitas Muhammadiyah**
**Palembang**

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

| | |
|---|---|
| **JUDUL** | **: ANALISIS MEKANISME PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG** |
| **Nama** | **: Zulfa Nanda Sari** |
| **NIM** | **: 22 2007 258 K** |
| **Fakultas** | **: Ekonomi** |
| **Jurusan** | **: Akuntansi** |
| **Mata Kuliah Pokok** | **: Akuntansi Sektor Publik** |

**Diterima dan Disyahkan**
**Pada tanggal 28 Agustus 2010**

**Pembimbing**

**(Mizan, SE. Ak. M.Si)**

**Mengetahui**
**Dekan**
**u.b Ketua Kelas Reguler C**

**(Mizan, SE. Ak. M.Si)**

## *Motto :*

- ✓ *Kejarlah apa yang ada dihadapanmu & jangan Engkau berharap yang akan lebih jauh, sebab apa yang dihadapanmu itulah Jalannya.*
- ✓ *Suatu Keberhasilan adalah Cerminan dari Jerih Payah yang telah kita lakukan.....!!!!!!!!!*

***( Anonim )***

*Terucap Syukur Kupersembahkan Kepada-Mu ya Allah .....*

*Kupersembahkan kepada :*

- ➢ *Ayahanda dan Ibunda Tercinta*
  *Setetes Keringat dan Seuntai Do'a Darimu selangkah aku akan lebih maju*
- ➢ *Saudara - Saudaraku Tercinta*
  *Terima kasih atas Support dan Dukungannya*
- ➢ *Seseorang yang Kelak Mendampingiku*
  *Dengan mengenalmu aku jadi lebih baik dan bersamamu kelak aku akan sempurna*
- ➢ *Sahabat - Sahabatku*
- ➢ *Almamater Tercinta*

بسم الله الرحمن الرحيم

# PRAKATA

**Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarohkatuh**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi ini yang judul "Analisis Mekanisme Pemungutan Retribusi Terminal Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang " dapat penulis selesaikan tepat waktu.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku ( dan saudara – saudaraku ) yang telah mendidik, membiayai, memberikan do'a dan memeberikan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mizan, SE, Ak, M.Si yang telah membimbing, memberikan pengarahan dan saran – saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu juga terima kasih kepada pihak – pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak H. M. Idris, SE. M.Si., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan / karyawati.
2. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan dorongan baik berupa materil maupun spritual, ananda mengucapkan terima kasih atas ketabahan dan kesabaran dengan segala saran dan doa restunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Rosyadi, MM., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan / i.

4. Bapak Mizan, SE, Ak, M.Si, Selaku Ketua Kelas Regular C Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Mizan, SE, Ak, M.Si, Selaku Pembimbing Akademik.
6. Pimpinan beserta Staf bagian Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Pimpinan dan Seluruh Staf Dinas Perhubungan Kota Palembang yang telah membantu dalam memberikan data untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat- - sahabatku tercinta terima kasih atas supportnya selama ini
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh**

Palembang, Agustus 2010

**Zulfa Nanda Sari**

## DAFTAR ISI

**HALAMAN DEPAN** ..... i

**HALAMAN JUDUL** ..... ii

**HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT** ..... iii

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI** ..... iv

**HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO** ..... v

**HALAMAN PRAKATA** ..... vi

**HALAMAN DAFTAR ISI** ..... viii

**HALAMAN DAFTAR TABEL** ..... x

**HALAMAN DAFTAR GAMBAR** ..... xi

**HALAMAN ABSTRAK** ..... xii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 8

C. Tujuan Penelitian ..... 8

D. Manfaat Penelitian ..... 8

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Penelitian Sebelumnya ..... 10

B. Landasan Teori ..... 11

1. Terminal ..... 11

a. Pengertian Terminal..... 11

b. Pengertian Pelayanan Terminal..... 12

c. Objek Retribusi Terminal ..... 13

d. Subjek Retribusi Terminal..... 13

e. Tarif Retribusi Terminal..... 13

f. Golongan Retribusi ..... 14

2. Mekanisme Pemungutan Retribusi Terminal ..... 18

3. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah ..... 20

b. Unsur-Unsur Pendapatan Asli Daerah ..... ... 20

c. Langkah – Langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah.....21

d. Pengertian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah..... 24

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian ..... 26

B. Tempat Penelitian..... 26

C. Operasionalisasi Variabel ..... 27

D. Data yang Diperlukan ..... 27

E. Teknik Pengumpulan Data ..... 28

F. Analisis Data dan Teknik Analisis ..... 29

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian ..... 30

1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan..... 30

2. Struktur Organisasi..... 34

B. Pembahasan Hasil penelitian..... 53

1. Mekanisme Pemungutan Retribusi Terminal ..... 53

2. Pendapatan Asli Daerah..... 55

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan ..... 58

B. Saran..... 61

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL


| Tabel | Judul | Halaman |
|---|---|---|
| Tabel I.1 | Data Nama-nama Termina..... | 4 |
| Tabel I.2 | Target dan Realisasi Retribusi Terminal ..... | 6 |
| Tabel I.3 | Target dan Realisasi Retribusi Daerah..... | 6 |

# DAFTAR GAMBAR


| Gambar | Judul | Halaman |
|---|---|---|
| Gambar IV.1 | Struktur Organisasi..... | 39 |

## ABSTRACT

*Nanda Zulfa Sari / 22 2007 258 K / 2010 / The Mechanism of Analysis Levy Collection Terminals In Order To Improve Local Original Income / Public Sector Accounting.*

*The purpose of this study was to determine the mechanism of collecting levies Terminal in order to increase real income of the Regional Municipality of Palembang. This research is descriptive research. The data used are primary and secondary data. The method is a method of data collection interview. Used qualitative data analysis.*

*Results from this research mechanism Levy Collection of the existing terminal at the Transport Department Palembang go round as follows: Determination of Levy, Collection of Levy, Levy Billing, Deposit Levy, Bookkeeping and Reporting. Withholding and remittance procedure Terminal levies are as follows: The Department of Transportation Perform Levy Collection at the Terminal. Treasurer at the terminals to receive, collect and count the results of retribution. Recipient Treasurer Palembang Revenue Department of Transportation received funds from the treasurer at the terminal. Recipient Treasurer Revenue Department of Transportation Palembang South Sumatera to deposit into the Bank through the City Government Account. Local Original Income Level of Effectiveness Indicators: Budget Revenue is estimated the revenue and expenditure will be incurred to obtain economic benefits arising from the operations of companies or public sector in the future. Actual revenue is the real target level of attainment to obtain economic benefits arising from the operations of companies or public sector.*



*Key words : Voting Mechanism and Local Original Income*

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pengesahan Skripsi

Lampiran 2 Surat Keterangan Selasai Riset

Lampiran 3 Fotocopy Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 Fotocopy Sertifikat Mengaji

Lampiran 5 Biodata Penulis

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui pemberian kewenangan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan mengelola sumber keuangan daerah. Dimana pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama mengelola sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang memadai. Semakin besar keuangan daerah, semakin besar pula kemampuan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan daerah. Pemerintah daerah akan menjalankan fungsinya dengan baik apabila diterima sumber keuangan daerah yang cukup untuk dilaksanakan.

Retribusi terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir kendaraan umum, tempat kegiataan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud jaringan transportasi.

Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Retribusi Terminal digolongkan ke dalam retribusi jasa usaha yang menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi adalah pelayanan jasa angkutan dan jasa pendukung lainnya yang berada di daerah lingkungan kerja terminal milik Daerah. Subjek retribusi adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan di bidang jasa angkutan dan kegiatan penunjang lainnya, memanfaatkan dan menikmati fasilitas serta pelayanan di daerah lingkungan kerja terminal milik Daerah.

Tujuan penyelenggaraan terminal adalah untuk memberikan kenyamanan dan ketertiban bagi kendaraan, pengemudi dan penumpang guna keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Menurut Susilo dan Halim (2006:53) dalam kajian tentang keuangan daerah Pemerintah Kota Malang bahwa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah sebagai berikut :

a. Menekan tingkat kebocoran dan kelolosan, ini dapat dilihat dari :
    1) Mengefektifkan pemberlakuan sanksi.
    2) Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan operasional di lapangan.

b. Mengupayakan tersedianya pelayanan yang prima karena disebabkan oleh tidak tersedianya kualitas dan kuantitas sumber daya atau petugas pelaksana operasional di lapangan.

c. Membentuk team terpadu.

Dinas Perhubungan Kota Palembang merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberikan kewenangan di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara serta pos dan telekomunikasi. Dinas Perhubungan dalam rangka mengelolah retribusi pelayanan terminal berusaha untuk dapat meningkatkan pendapatan sehingga dapat mencapai target atau melebihi target anggaran yang telah ditetapkan, menghindari dari segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan dari retribusi terminal.

Pemerintah Kota Palembang dalam pengelolaan retribusi daerah diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan dibantu oleh dinas-dinas tertentu. Dimana setiap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari setiap dinas akan diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah. Kemudian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola dan digunakan, guna pertumbuhan dan perkembangan Kota Palembang.

Kota Palembang merupakan pusat perdagangan Sumatera Selatan dan juga merupakan kota besar, dikatakan kota besar karena adanya perhubungan antar kota dan provinsi yaitu perhubungan laut, darat, angkutan sungai, danau, penyebrangan, dermaga-dermaga, pelabuhan penyebrangan,

dan adanya bidang perhubungan udara, dan pos telekomunikasi. Dengan melihat banyak perhubungan kota dan provinsi, kota Palembang sangat kompetensi untuk memajukan daerahnya. Diharapkan Pemerintah Kota Palembang khususnya Dinas Perhubungan (DISHUB) yang dapat menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada retribusi terminal.

Kegiatan-kegiatan yang dikelola Dinas Perhubungan Kota Palembang yaitu :

1. Parkir Ditepi Jalan
2. Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Terminal
4. Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan
5. Izin Trayek
6. Pembinaan Hubungan Udara yaitu Pos dan Telekomunikasi

Kota Palembang memiliki berbagai macam terminal yang tersebar di berbagai sudut kota palembang :

**Tabel I.1**
**Data Nama-nama Terminal di Kota Palembang**

| No | Nama Terminal | Type |
|---|---|---|
| 1. | Karya Jaya | A |
| 2. | Alang-alang Lebar | A |
| 3. | Jakabaring | B |
| 4. | Plaju | B |
| 5. | Ampera | C |
| 6. | Lemabang | C |
| 7. | 7 Ulu | C |
| 8. | Sako | C |
| 9. | Tangga Buntung | C |

***Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang,2010***

Pada tabel I.1 di halaman sebelumnya bahwa di Kota Palembang terdapat 9 terminal, yang mana berpotensi untuk menambah kas suatu daerah khususnya daerah Kota Palembang apabila terdapat suatu hubungan kerjasama yang baik antar pihak angkutan umum dengan Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam rangka kewajiban membayar retribusi terminal.

Terminal merupakan tempat mengangkut dan menurunkan penumpang Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP). Setiap mobil angkutan dalam dan luar propinsi yang mengangkut penumpang diwajibkan memasuki terminal untuk membayar retribusi, yang mana setiap mobil angkutan umum yang masuk akan diberi karcis dan ditagih retribusi sebesar dengan besar kecilnya mobil angkutan umum tersebut.

Penerimaan yang diterima oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang dari tahun ke tahunnya semestinya memberikan pengaruh terhadap pencapaian realisasi atas target yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan itu sendiri, akan tetapi pada kenyataannya realisasi yang terjadi dari tahun ke tahunnya tidak sesuai dengan target yang diharapkan, dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang terjadi seperti maraknya persaingan angkutan umum dengan angkutan pribadi, adanya Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP) yang tidak masuk terminal serta banyaknya fasilitas sarana yang ada di terminal tidak dimanfaatkan sehingga hal ini akan mengurangi pendapatan.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang yaitu mendorong peningkatan pelayanan baik oleh perusahaan maupun oleh pengelolaan terminal, menertibkan penggunaan pool-pool didalam kota dan atau travel Angkutan Kota Antar Propinsi dan Antar Kota Dalam Propinsi.

Mekanisme pemungutan retribusi terminal diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah kota palembang, tetapi tahun 2006-2009 retribusi terminal tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan. Berikut ini akan diuraikan target dan realisasi penerimaan retribusi terminal tahun 2006-2009.

**Tabel I.2**
**Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal di Kota Palembang Tahun 2006-2009**

| No | Tahun Anggaran | Target | Realisasi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | Rp 2.000.000.000 | Rp 1.405.754.200 | 70,29 % |
| 2 | 2007 | Rp 2.000.000.000 | Rp 1.214.690.850 | 60,73 % |
| 3 | 2008 | Rp 2.250.000.000 | Rp 1.239.446.700 | 55,09 % |
| 4 | 2009 | Rp 2.500.000.000 | Rp 1.379.046.450 | 55,16 % |

***Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2010***

**Tabel I.3**
**Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Palembang Tahun 2006-2009**

| No | Tahun Anggaran | Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal | Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah | Kontribusi (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | Rp 1.405.754.200 | Rp 40.375.914.272 | 66,14 % |
| 2 | 2007 | Rp 1.214.690.850 | Rp 48.572.158.218 | 86,74 % |
| 3 | 2008 | Rp 1.239.446.700 | Rp 59.055.021.400 | 90,39 % |
| 4 | 2009 | Rp 1.379.046.450 | Rp 51.274.328.286 | 79,34 % |

***Sumber : Dinas Pendapatan Kota Palembang, 2010***

Berdasarkan tabel di halaman sebelumnya, dapat dilihat bahwa tahun 2006 target penerimaan retribusi terminal Rp 2.000.000.000,- dan realisasi penerimaan retribusi terminal Rp 1.405.754.200,- serta jumlah pendapatan daerah sebesar Rp 40.375.914.272,- dari data tersebut kontribusinya terhadap penerimaan Retribusi Daerah yaitu : 66,14 %. Tahun 2007 target penerimaan retribusi terminal Rp 2.000.000.000,- dan realisasi penerimaan retribusi terminal Rp 1.214.690.850,- serta jumlah pendapatan daerah sebesar Rp 48.572.158.218 ,- dari data tersebut kontribusinya terhadap penerimaan Retribusi Daerah yaitu : 86,74 %. Tahun 2008 target penerimaan retribusi terminal Rp 2.250.000.000,- dan realisasi penerimaan retribusi terminal Rp 1.239.446.700,- serta jumlah pendapatan daerah sebesar Rp 59.055.021.400,- dari data tersebut kontribusinya terhadap penerimaan Retribusi Daerah yaitu : 90,39 %. Tahun 2009 target penerimaan retribusi terminal Rp 2.500.000.000,- dan realisasi penerimaan retribusi terminal Rp 1.379.046.450,- serta jumlah pendapatan daerah sebesar Rp 51.274.328.286,- dari data tersebut kontribusinya terhadap penerimaan Retribusi Daerah yaitu : 79,34 % .

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Mekanisme Pemungutan Retribusi Terminal Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang."**

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme pemungutan Retribusi Terminal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui mekanisme pemungutan Retribusi Terminal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan penulis dalam hal Mekanisme pemungutan Retribusi Terminal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

2. Bagi Dinas Perhubungan Kota Palembang

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengelolaan retribusi terminal agar realisasi penerimaan retribusi terminal dapat meningkat.

3. Bagi Almamater

   Sebagai bahan kajian dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan retribusi terminal.

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul "Analisis Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang" yang telah dilakukan oleh M. Rusdi (2007). Perumusan masalah dalam penelitian bagaimanakah penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Palembang. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui pengawasan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Terdapat satu variabel yang digunakan yaitu penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Data yang digunakan adalah data primer dan teknik pengumpulan data berupa wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor belum optimal.

Perbedaannya kalau penelitian sebelumnya menganalisis penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor sedangkan penelitian sekarang ingin mengetahui mekanisme pemungutan retribusi terminal dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah kota palembang.

## B. Landasan Teori

### 1. Terminal

#### a. Pengertian Terminal

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang retribusi terminal adalah sebagai berikut :

Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud jaringan transportasi.

Terminal dibagi menjadi tiga tipe, yaitu :

1) Terminal Penumpang Tipe A

   Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Antar Propinsi dan atau angkutan lintas batas Negara, Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi, Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan.

2) Terminal Penumpang Tipe B

   Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi, Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan.

3) Terminal Penumpang Tipe C

   Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal yang melayani Angkutan Kota dan Pedesaan.

**b. Pengertian Pelayanan Terminal**

Pelayanan Terminal adalah pelayanan tempat bagi sarana angkutan, penyediaan tempat parkir mobil penumpang umum dan tak umum, penyediaan fasilitas pelayanan penumpang, tempat bermalam kendaraan, awak dan penumpang, stasiun pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), bengkel, tempat cucian, penyediaan tempat usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota.

Penyelenggaraan pelayanan terminal meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan dan fasilitas terhadap kendaraan umum yang diwajibkan masuk terminal.
b. Memberikan pelayanan parker khusus di daerah lingkungan kerja terminal.
c. Memberikan pelayanan dan fasilitas terhadap penumpang melalui peron.
d. Memberikan pelayanan dan fasilitas kamar mandi dan kamar kecil.
e. Memberikan palayanan dan fasilitas ruang tunggu.
f. Memberikan pelayanan dan fasilitas mushollah, kantor atau loket, kios atau petak, tempat penitipan barang dan rumah makan.

**c. Objek Retribusi Terminal**

Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan jasa angkutan dan jasa pendukung lainnya yang berada di daerah lingkungan kerja terminal milik daerah.

**d. Subjek Retribusi Terminal**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 Tahun 2001 (2001: 92-94) disebutkan subjek retribusi adalah sebagai berikut :

1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan di bidang jasa angkutan dan kegiatan penunjang lainnya, memanfaatkan dan menikmati fasilitas serta pelayanan di daerah lingkungan kerja terminal milik Daerah..
3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

**e. Tarif Retribusi Terminal**

Untuk setiap pelayanan jasa terminal dikenakan retribusi. Besarnya retribusi sebagaimana ditetapkan sebagai berikut :

1) Angkutan Kota :

| | | |
|---|---|---|
| a. Otolet dan Bus Kecil | Rp | 500,- |
| b. Bus Kota | Rp | 1.000,- |

2) Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) :

| | |
|---|---|
| a. Bus Kecil | Rp 2.000,- |
| b. Bus Sedang | Rp 3.000,- |
| c. Bus Besar | Rp 6.000,- |

3) Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) :

| | |
|---|---|
| a. Bus Kecil | Rp 5.000,- |
| b. Bus Sedang | Rp 7.500,- |
| c. Bus Besar dan Super Eksekutif | Rp 10.000,- |

4) Retribusi Pelayanan Parkir Khusus di Terminal :

| | |
|---|---|
| a. Kendaraan Tak Umum | |
| (1) Bus Sedang/Bus Besar/Truk | Rp 2.500,- |
| (2) Mobil Penumpang/Bus Kecil/Pick Up | Rp 2.000,- |
| (3) Sepeda Motor | Rp 1.000,- |
| b. Kendaraan umum dan tak umum yang menginap di Terminal | Rp 15.000,- |

5) Retribusi Pelayanan dan Fasilitas Kamar Mandi dan Kamar Kecil:

| | |
|---|---|
| a. Mandi / Buang air besar | Rp 2.000,- |
| b. Buang air kecil | Rp 1.000,- |

6) Retribusi Pelayanan Ruang Tunggu VIP Rp 2.000,-

7) Retribusi Pemakaian Tempat Dalam Terminal :

| | |
|---|---|
| a. Kantor/Loket kelas A | Rp 250.000,-/thn |

| | | |
|---|---|---|
| b. | Kantor/Loket kelas B | Rp 150.000,-/thn |
| c. | Kios/Petak | Rp 200.000,-/thn |
| d. | Rumah Makan/Cafetaria | Rp 200.000,-/thn |
| e. | Ruang terbuka yang digunakan untuk kegiatan komersil | Rp 200.000,-/thn |

**f. Golongan Retribusi**

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, Tentang Golongan Retribusi Terminal adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Kriteria retribusi jasa umum adalah sebagai berikut :

1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi perizinan tertentu.
2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang harus membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraanya.

6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial.

7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut :

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
2) Retribusi Pelayanan Persampahan
3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
4) Retribusi Pelayanan pemakaman
5) Retribusi Pelayanan Perkir di Tepi Jalan Umum
6) Retribusi Pelayanan Pasar
7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran
9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha yaitu jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Kriteria retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut :

1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seharusnya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut :

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
3) Retribusi Tempat Pelelangan
4) Retribusi Terminal
5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
6) Retribusi Tempat Penginapan
7) Retribusi Penyedotan Kakus

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu yaitu kegiatan Tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan.

Kriteria retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut :

1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.

3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut :

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3) Retribusi Izin Gangguan
4) Retribusi Izin Trayek

**2. Mekanisme Pemungutan Retribusi Terminal**

Pemungutan Retribusi Terminal tidak boleh diborongkan. Retribusi Terminal dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Adapun mekanisme pemungutan retribusi terminal Pemerintah Kota Palembang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Palembang yang diatur dalam Peraturan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 huruf 13 dinyatakan bahwa :

"Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari penghimpunn data objek pajak dan subjek pajak atau retribusi, penetuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan dan penyetorannya".

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2005:899), menyatakan mekanisme sama dengan prosedur yang mana merupakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam menyelesaikan suatu aktivitas atau dalam memecahkan suatu permasalahan.

Jadi berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian mekanisme pemungutan retribusi terminal adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan tarif retribusi, penagihan dan pemungutan retribusi serta pengawasan dan penyetoran hasil pemungutan retribusi terminal.

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2008, tentang penyelenggaraan retribusi terminal, mekanisme pemungutan retribusi terminal adalah sebagai berikut :

a. Penetapan Retribusi
b. Pemungutan Retribusi
c. Penagihan Retribusi
d. Penyetoran Retribusi
e. Pembukuan dan Pelaporan

## 3. Pendapatan Asli Daerah

### a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang peraturan daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan dan perundangan – undangan.

Berdasarkan Undang – Undang No 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) , terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah :
   1) Hasil Pajak Daerah
   2) Hasil Retribusi Daerah
   3) Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
   4) Pendapatan lain-lain yang sah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

### b. Unsur-Unsur Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah menyatakan bahwa unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

a. Hasil Pajak Daerah Yaitu : Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada semua objek pajak seperti : orang,atau badan, benda bergerak atau tidak bergerak.
b. Hasil Retribusi Daerah Yaitu : Pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang berlaku oleh Pemerintah Daerah secara langsung dan nyata.
c. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
d. Pendapatan lain-lain yang sah. Misalkan hasil penjualan asset tetap dan jasa giro.

**c. Langkah – Langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah**

Menurut Mardiasmo (2002:146) Langkah – langkah penting yang harus dilakukan pemerinth daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah sebagai berikut :

a. Menghitung potensi retribusi yang riil dimiliki daerah.
b. Pemerintah daerah sebaiknya tidak menambah pemungutan yang bersifat pajak yang dibayar oleh masyarakat adalah pajak pusat saja.
c. Dalam menentukan kebijakan untuk menngkatkan retribusi langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna layanan publik, Peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong

peningkatan kualitas pelayanan publik karena masyarakat tentu tidak mau membayar lebih bila pelayanan yang diterima sama saja kualitas dengan kuantitasnya.

Menurut Kunarjo (2001:178) Untuk mengatasi rendahnya penerimaan daerah dalam pembiayaan , pada umumnya pemerintah dapat melakukan dua pendekataan yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.

Untuk melakukan pendekatan intensifikasi, maka yang harus dilakukan adalah :

a. Kemampuan sumber daya harus ditingkatkan.
b. Koordinasi antara karyawan dan instansi terkait dikembangkan.
c. Kualitas pelayanan di perbaiki.

Sedangkan usaha untuk ekstensifikasi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Pendekatan objek dan subjek retribusi
b. Penggalian sumber-sumber baru
c. Pembuatan peraturan-peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan.

Intensifikasi adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti ( Dodi dan Halim 2004:109).

Dalam usaha intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalia yang pelaksanaannya meliputi :

a. Memperbaiki atau menyesuaikan aspek kelembagaan atau organisasi pengelola Pendapatan Asli Daerah.
b. Memperbaiki atau menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional, meliputi :
   1) Penyesuaian atau penyempurnaan administrasi pungutan
   2) Penyesuaian tarif
   3) Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan
c. Peningkatan pengawasan dan pengendalian.

   Bagaimanapun baiknya perencanaan, jika tidak disertai dengan pengendalian yang efektif bisa saja terjadi kebocoran – kebocoran untuk itu perlu dilakukan pengawasan, meliputi :
   1) Pengawasan dan Pengendalian yuridis
   2) Pengawasan dan Pengendalian teknis
   3) Pengawasan dan Pengendalian penata usaha
d. Peningkatan sumber daya manusia.
e. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media radio, televisi maupun selebaran untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak maupun retribusi.

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk mengali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, namun tidak bertentangan dengan kebijakan pajak nasional, yakni pungutan pajak dan retribusi yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya. ( Dodi dan Halim 2004:109).

Upaya-upaya ekstensifikasi adalah sebagai berikut :

a. Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak dan retribusi
b. Menambah wajib pajak dan retribusi baru

**d. Pengertian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Widodo (2004:152), menyatakan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang ideal apabila realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah setelah dipotong biaya pemungutan hasilnya tetap melebihi jumlah anggaran yang ditetapkan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatan tersebut efisien atau tidak.

Hal itu perlu dilakukan meskipun Pemerintah Daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata realisasi penerimaan pendapatan daerah setelah dipotong

dengan biaya pemungutan lebih kecil dari pada anggaran yang telah ditetapkan.

# BAB III

# METODOLOGI PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Menurut Supardi (2005) jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplansi penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1) Penelitian Deskriptif

   Adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2) Penelitian Komparatif

   Adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan.

3) Penelitian Asosiatif

   Adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih berdasarkan jenis penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui, menilai suatu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain tentang mekanisme pemungutan retribusi terminal dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah kota palembang.

## B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang yang beralamat di Jl. Pangeran Sido Ing. Lautan 35 Ilir Palembang.

## C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur.

**Tabel III. 1**

**Operasionalisasi Variabel**

| No | Variabel Penelitian | Definisi Variabel | Indikator |
|---|---|---|---|
| 1. | Mekanisme Pemungutan Retribusi Terminal | Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008, tentang pengelolaan retribusi terminal, mekanisme pemungutan retribusi terminal | 1. Penetapan Retribusi<br>2. Pemungutan Retribusi<br>3. Penagihan Retribusi<br>4. Penyetoran Retribusi<br>5. Pembukuan dan Pelaporan |
| 2 | Pendapatan Asli Daerah | Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan dan perundangan – undangan. | 1. Anggaran PAD<br>2. Realisasi PAD |

***Sumber : Penulis, 2010***

## D. Data yang Diperlukan

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Soepomo (2004:146) data terdiri dari dua :

1. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).

2. Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti melalui media perantara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dengan pimpinan atau karyawan Dinas Perhubungan Kota Palembang sedangkan Data sekunder berupa :

1. Sejarah singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang
2. PERDA Kota Palembang tentang Retribusi Terminal
3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2009
4. Aktivitas Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2009
5. Target dan Realisasi Retribusi Terminal Tahun 2006-2009

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Penguumpulan Data Menurut Nan Lin dalam buku W. Gulo (2002:115-123), teknik pengumpulan data terdiri atas :

1. Pengamatan adalah metode pengumpulan data, peneliti mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian.
2. Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument untuk meminta tanggapan dan respon terhadap sample.
3. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.
4. Kuesioner adalah pertanyaan yang disusun dalam bentuk kalimat "Tanya".
5. Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa di waktu lalu.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pimpinan dan karyawan Dinas Perhubungan Kota Palembang serta Dokumentasi dengan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

## F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut Soeretno dan Lin Colin Arsyad (2003:125) menyatakan bahwa metode analisis dibagi dua yaitu :

1. Metode Analisis Kualitatif adalah analisis data dimana datanya tidak dinyatakan dalam bentuk angka-angka.
2. Metode Analisis Kuantitatif adalah analisis data dimana datanya dinyatakan dalam bentuk angka-angka yang dapat diukur.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan membandingkan teori-teori dengan praktek yang ada di lapangan. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan cara menjelaskan mekanisme pemungutan Retribusi Terminal dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah kota palembang sehingga dapat diperoleh kesesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang ditemukan pada tempat penelitian.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian

### 1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

#### a. Sejarah Singkat Pemerintahan Kota Palembang

Palembang adalah Pusat Kesultanan Palembang Darussalam, Kesultanan Palembang Darussalam berakhir dengan penandatanganan kontrak oleh Sultan Ahmad Najamuddin III Prabu Anom anak Sunan Husni Dhiahuddin Suak Bato pada tanggal 18 Agustus 1823, isi kontraknya adalah Sultan menyerahkan Pemerintahan Kerajaaan Palembang kepada Pemerintahan Belanda, sejak kontrak tanggal 18 Agustus 1823 Commisaris Sevenhoven pejabat Pemerintahan Belanda pertama, kemudian Kota Palembang dijadikan Geanate Haminte berdasarkan *Stablat* Nomor 126 Tahun 1906 tanggal 1 April 1942, Palembang SYI yang dipimpin oleh SYI-CO (Walikota) dari tahun 1942 hingga kemerdekaan Republik Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 103 Tahun 1945 Palembang ditetapkan sebagai Kota Kelas A. Pada Tahun 1965 dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Palembang menjadi Kotamadya. Kota Palembang merupakan Ibu Kota Propinsi Sumatera Selatan, dengan luas wilayah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 sebesar 400,61 KM2.

Jarak Kota Palembang dengan Laut yaitu Muara Sungai Musi 103 KM2.

Pada tahun 2000 dalam memenuhi ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kecamatan yang telah diundang-undangkan pada tanggal 11 Desember 2000 dalam lembar Daerah Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2000, maka Kecamatan sebelumnya hanya 8 kecamatan menjadi 14 wilayah Kecamatan.

Letak Geografis Kota Palembang terletak antara 104,37[1] Bujur Timur dengan104,52[1] Bujur Timur dengan garis 2,51[1] Lintang Selatan. Jadi secara geografis Kota Palembang terletak di Sumatera Selatan bagian timur dan dibelah oleh Sungai Musi. Batas-batas Kota Palembang adalah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Kabupaten Musi Banyu Asin

Sebelah Utara : Kabupaten Musi Banyu Asin

Sebelah Timur : Kabupaten Banyu Asin

Sebelah Selatan : Kabupaten Ogan Ilir

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1998, maka Kota Palembang adalah 400,61 $KM^2$ atau 40,61 Ha dan terletak didaratan rendah dengan ketinggian rata-rata 12 meter di atas permukaan laut serta tempat tertinggi adalah Puncak Bukit Siguntang yaitu 27 meter di atas permukaan laut, berdasarkan jumlah penduduk Kota Palembang termasuk kategori Kota Besar.

**b. Gambaran Umum Pemerintahan Kota Palembang**

Organisasi Pemerintah Kota Palembang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Peraturan Daerah Otonom Tingkat II Palembang Kotapraja dalam Propinsi Sumatera Selatan (AM Wantjik, penemu dari jadi Kota Palembang Tahun 1974)

Dalam pengembangan organisasi, Pemerintah Kota Palembang berpedoman pada :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Tata Kerja Sekretaris Daerah.
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Pemerintah Kota Palembang.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Peraturan Daerah Otonom Tingkat II Palembang dalam Propinsi Sumatera Selatan.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sekretaris Pemerintah Kota Palembang merupakan organisasi induk Pemerintah Kota Palembang yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang merupakan unsur staf Pemerintah Daerah.

Sebagai landasan dalam tugas pokokdan fungsinya berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 240 Tahun 1993.

**c. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Palembang**

Dinas Perhubungan Kota Palembang dibentuk melalai lima tahapan instansional yang dimulai dari terbentuknya LLAJ Palembang I, kemudian mengalami perubahan menjadi LLAJR Wilayah I, berubah lagi menjadi cabang Dinas 1 LLAJR Tingkat II Kodya Palembang, pada tanggal 26 Maret 1996, cabang Dinas 1 LLAJR Tingkat II Kodya Palembang oleh Bapak H. Husni dirubah menjadi Dinas LLAJ Kotamadya Tingkat II Palembang yang keberadaannya dibawah Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Palembang, terakhir pada bulan Mei Tahun 2001 menjadi Dinas Perhubungan Kota Palembang yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang.

Dinas Perhubungan Kota Palembang merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberikan kewenangan di bidang perkereta apiaan, perhubungan laut, udara serta pos dan telekomunikasi. Dinas Perhubungan mempunyai tugas dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang perhubungan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan yang diterima oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang di peroleh dari enam retribusi , salah satunya retribusi terminal.

## 2. Struktur Organisasi

### a. Kedudukan dan Fungsi Pokok

Dalam menjalankan tugasnya Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas-tugas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah sebagai berikut :

1) Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perhubungan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palembang :

1) Merumuskan kebijakkan teknis dibidang perhubungan yang bersifat mendukung secara operasional Kebijakan Pemerintah Kota Palembang.
2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan dibidang perhubungan.
3) Melaksanakan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
4) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Walikota tentang langkah-langkah dan tindakkan yang perlu diambil dalam melakukan tugas dari pada Dinas Perhubungan.

5) Mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok.

**b. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang**

**a) Visi Dinas Perhubungan**

Terwujudnya sarana, prasarana dan kualitas penyediaan jasa perhubungan yang mampu mendukung pertumbuhan pembangunan dan kepuasan pengguna jasa.

**b) Misi Dinas Perhubungan**

- Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan perhubungan melalui pengelolaan angkutan antar propinsi dan antar propinsi untuk mewujudkan jaminan keselamatan, aksesilitas, mobilitas dan pemerataan pelayanan angkutan di Kota Palembang.
- Melakukan pengendalian, pengawasan dan penegakkan hukum terhadap pelaku Perhubungan di Kota Palembang.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan serta mengembangkan manajemen keselamatan lalu lintas.
- Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia yang kreatif dan pro aktif untuk mengantisipasi perkembangan IPTEK.
- Mengembangkan budaya rasa memiliki pada masyarakat akan arti pentingnya keselamtan pemeliharaan fasilitas perhubungan.
- Menata kembali perundang-undangan sektor perhubungan berkaitan dengan perkembangan lingkungan strategis.

## c. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

### 1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi menggambarkan susunan kerja yang disertai dengan pembagian tugas atau pelimpahan wewenang serta tanggung jawab secara formal dalam setiap fungsi organisasi. Struktur organisasi melukiskan interaksi kegiatan, peranan, hubungan, tujuan dan sifat-sifat organisasi lainnya, tetapi perlu diingat pula bahwa peranan struktur pada setiap organisasi ternyata berlainan dalam tingkat dan kualitasnya.

Suatu struktur organisasi menunjukkan tugas dan wewenang atau tanggung jawab dari masing-masing pegawai agar tidak saling tumpang tindih. Secara umum struktur organisasi yang digunakan dalam organisasi pemerintahan adalah struktur organisasi garis atau lini yang merupakan tipe, organisasi yang tertua dan paling sederhana.

Pada struktur organisasi ini wewenang puncak pimpinan mengatur bagian-bagian yang ada di bawahnya secara langsung, sehingga dapat mempermudah tujuan organisasi. Adapun pola struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001, yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Kepegawaian

c. Sub Bagian Keuangan

4. Sub Dinas Program, terdiri dari :

a. Seksi penyusunan rencana dan program

b. Seksi pemantauan dan pengendalian

c. Seksi evaluasi dan retribusi

5. Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari :

a. Seksi Lalu lintas

b. Seksi Angkutan

c. Seksi Teknis sarana

d. Seksi Prasarana

6. Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi , terdiri dari :

a. Seksi Perhubungan udara

b. Seksi Pos

c. Seksi Telekomunikasi

7. Sub Dinas Laut, Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Kereta Api, terdiri dari :

a. Seksi Perhubungan laut

b. Seksi Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan

c. Seksi Perkereta apiaan

8. Sub Dinas Pengendalain Operasional, terdiri dari :

a. Seksi Pengendalain operasional lalu lintas dan angkutan jalan

b. Seksi Pengendalian perhubungan laut, angkutan sungai, danau, penyeberangan dan kereta api.

c. Seksi Pengendalian operasional perhubungan udara, pos dan telekomunikasi

d. Seksi Penyuluhan

9. Cabang Dinas, terdiri dari :

a. Kepala cabang Dinas

b. Unsur Staf / Petugas administrasi

c. Unsur Lini / Petugas teknis operasioanl

d. Kelompok jabatan Fungsional

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Unsur Staf / Petugas Administrasi

c. Unsur Lini / petugas teknis operasional

11. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar IV.1
Stuktur Organisasi Perhubungan (DISHUB)
Pemerintah Kota Palembang

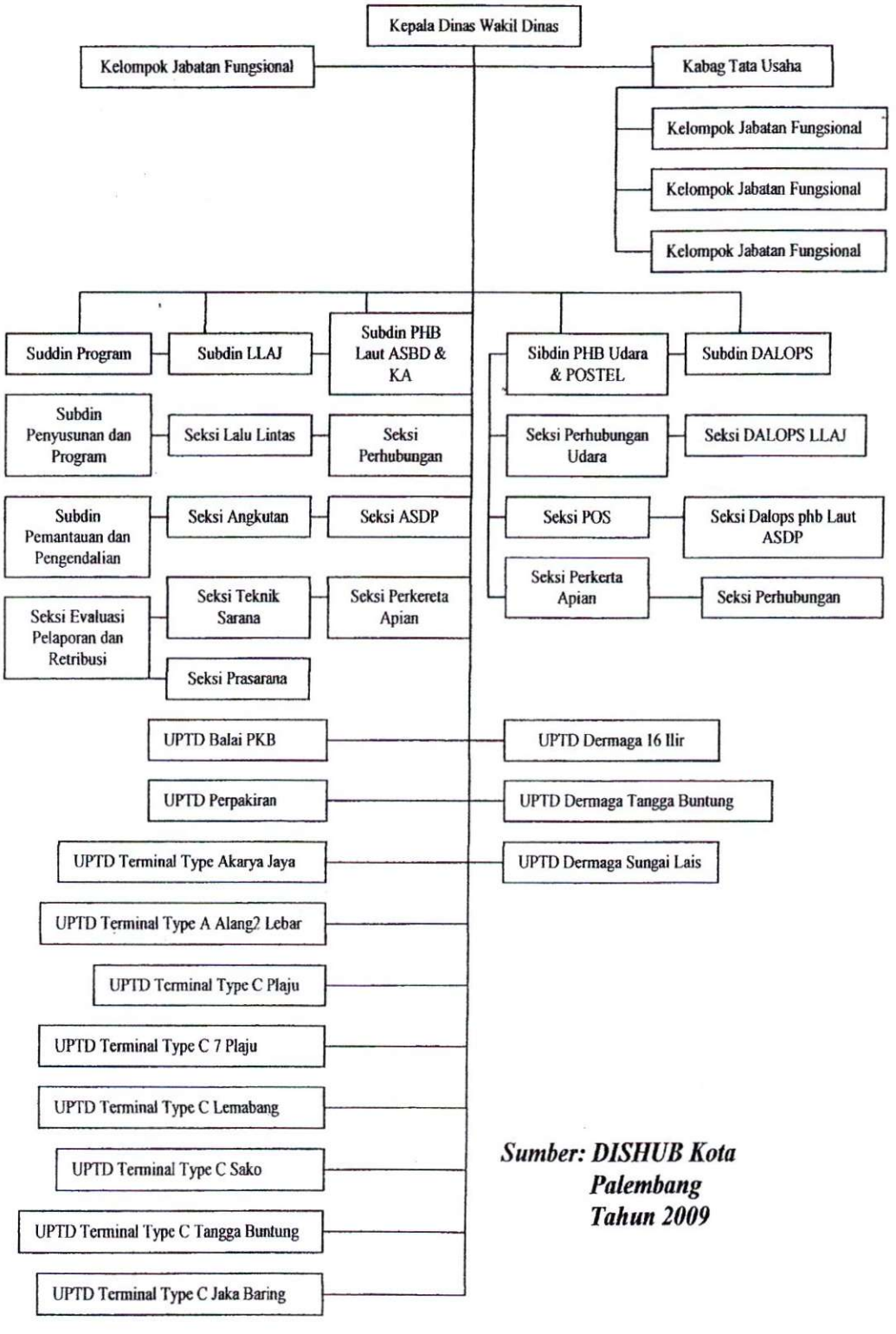


***Sumber: DISHUB Kota Palembang Tahun 2009***

**2. Pembagian tugas**

1. Kepala Dinas

Bertugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang lalu lintas yang diberikan oleh pemerintah kota palembang (Walikota) kepala dinas mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang perhubungan dengan kebijaksanaan yang di gariskan oleh kepala daerah berdasarkan ketentuaan peraturan perundangundangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

b. Memimpin kegiatan dan urusan wakil kepala dinas, kepala bagian tata usaha, dan kepala-kepala sub dinas yang ada dalam lingkungan yang sesuai dengan tugas yang di berikan oleh pemerintah daerah.

c. Merumuskan kebijaksanaan operasional pembangunan daerah.

d. Melaksanakan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta.

e. Mengadakan komunikasi, konstiltasi dan kerja sama dengan unsur unsur pemerintah daerah dan instansi serta masyararakat dalam usaha pelaksanaan

tugas pokok.

f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala daerah.

g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala daerah tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2. Wakil Kepala Dinas

Membantu tugas-tugas kepala dinas membuat program kerja dinas perhubungan (DISHUB) jangka pendek, menengah, jangka panjang, memberikan saran /pertimbangan kepada kepala Dinas mengenai langka-langka dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang dan tugasnya menjalankan tugas dan fungsi kepala dinas sehari-hari apabila kepala dinas berhalangan dan berada di luar daerah atau luar kota wakil kepala dinas mempunyai fungsi :

a. Membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

b. Mengkoordinir bagian tata usaha Sub Dinas, Cabang Dinas, unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional yang ada dalam lingkungannya dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

c. Memberikan saran atau pertimbangan kepada kepala dinas mengenai langka-langka dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

d. Menjalankan tugas dan fungsi kepala dinas berhalangan atau berada di luar daerah berdasarkan Surat penunjukan kepala Daerah.

e. Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang di berikan oleh kepala dinas.

3. Bagian Tata Usaha

Bertugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengolaan urusan keuangan, kepegawaiaan, rumah tangga, surat menyurat dinas, protokol, pembuatan laporan dinas serta hubungan masyarakat. bagian tata usaha mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaiannya.

b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

c. Melaksanakan pengelolaan administrasi hukum dan humas.

d. Melaksanakan ketata usahaan dan kearsipan.

Bagian tata usaha terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas mengurus surat menyurat dan mengelola arsip.

b. Sub Bagian Kepegawaian

Mempunyai fungsi melakukan pengelolaan urusan kepegawaian.

c. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

4. Sub dinas Program

Melaksanakan pengelolaan keuangan kebutuhan dinas atau kantor untuk meyelenggarakan tugasnya Sub Dinas. Program mempunyai fungsi:

a. Menyiapkan bahan pengumpulan pengelolaan data.

b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di Wang perhubungan.

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendaliaan pelaksanaan program.

d. Menyiapkan bahan pelaksana evaluasi pelaporan kegiatan dan mengelola retribusi di bidang perhubungan.

Sub dinas program terdiri dari :

a. Seksi peyusunan rencana dan program

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan rencana program kegiatan bidang perhubungan.

b. Seksi pemantauan dan pengendaliaan

Mempunyai tugas melaksanakan pemantauan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan bidang perhubungan.

c. Seksi evaluasi pelaporan dan retribusi

Mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perhubungan Berta kegiatan retribusi yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan.

5. Sub Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Sub dinas lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas ,manajemen angkutan, prasarana serta keselamatan dan teknik sarana.

Untuk menyelenggarakan tugasnya sub Dinas lalu lintas dan Angkutan jalan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
b. Menyusun rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan.

c. Menyusun rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan saran lalu lintas dan angkutan jalan.

Sub Dinas Lalu Lintas dan angkutan jalan terdiri dari

a. Seksi Lalu Lintas

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

b. Seksi Angkutan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian izin dan penetapan trayek angkutan jalan, pengendalian angkutan, perumusan kebijakan angkutan dan bahan pembinaan pelaksanaan angkutan.

c. Seksi Prasarana

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan dan penyediaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta babas pemantauan dan anallsis kinerja prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

d. Seksi Teknik Sarana

Mempunyai tugas menyiapkan babas pembinaan inventaris, pembinaan perbengkelan umum, penataan izin pendirian bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum, serta

pembinaan terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan.

6. Sub Dinas Perhubungan Laut, Angkutan Sungai Danau Penyebrangan (ASDP) dan Kereta Api

   Sub Dinas Perhubungan Laut, Angkutan Sungai Danau Penyebrangan (ASDP) dan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pembinaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perhubungan taut, lalu lintas angkutan sungai danau penyebrangan dan kereta api.

   Untuk menyelenggarakan tugasnya,Sub Dinas Perhubungan Laut, Angkutan Sungai Danau Penyebrangan (ASDP) dan Kereta Api mempunyal fungsi :

   a. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan lalu lintas, sungai danau penyebrangan dan kereta api.
   b. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan angkutan laut, angkutan sungai, danau penyebrangan dan kereta api.
   c. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana perhubungan laut, angkutan laut, angkutan sungai danau pmyebrangan dan KA

d. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi kegiatan untuk menunjang keselamatan lalu lintas laut dang angkutan sungai, danau penyebrangan dan kereta api.

7. Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi

Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pembinaan dan memfasilitasl pelaksanaan kegiatan ke bandara udara dan angkutan udara serta penunjang pelaksanaan penerbangan pos dan telekomunikasi. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan telekomunikasi mempunyai tugas:

a. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ke bandara udara.
b. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan angkutan udara serta menunjang keselamatan penerbangan.
c. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan usaha jasa pos.
d. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi.

Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :

a. Seksi.perhubungan Udara

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan rekomendasi pembangunan di dalam bandara udara dan pemberian izin lokasi bandara udara serta melakukan penyiapan bahan pemberian rekomendasi penerbitan IMB bagi bangunan dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) serta pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan angkutan udara.

b. Seksi Pos

Mempunyai tugas meyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan efisiensi kegiatan fialteli, izin jasa titipan dan bahan pembinaan kegiatan usaha jasa pos.

c. Seksi Telekomunikasi

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan izin penyelenggaraan instalasi, kabel. rumah (IKRG), pengujian alas komunikasi dan bahan pembinaan kegiatan jasa usaha telekomunikasi.

8. Sub Dinas Pengendalian Operasional

Sub Dinas Pengendalian Operasional mempunyai tugas Operasional perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, angkutan danau, penyebrangan, angkutan jalan

rel, angkutan udara, pos dan telekomunikasi serta menyiapkan bimbingan keselamatan dan penertiban pads sektor perhubungan.

Untuk penyelenggaraan tugasnya, sub dinar pengendalian operasional mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian lalu lintas, angkutan jalan, angkutan sungai, dan penyebrangan, angkutan jalan rel, angkutan udara, pos dan telekomunikasi.

b. Penyusunan rencana pembinaan penegakkan hokum dibidang perhubungan.

c. Penyusunan rencana pembinaan dan pemberian bimbingan serta penyuluhan kepada masyarakat dan memfasilitasi kegiatan bimbingan dan penyuluhan.

d. Penyusunan rencana bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, dan penyebrangan, angkutan jalan rel, pos dan telekomunikasi.

Sub Dinas Pengendalian Operasional Terdiri Dari:

a. Seksi Pengendalian Operasional lalu lintas dan Angkutan jalan.

   Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,

pengawasan dan pengendalian serta bimbingan keselamatan lalu limas angkutan jalan.

b. Seksi pengendallan operasional perhubungan laut, angkutan sungai danau penyebrangan dan kereta api.

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendahan serta bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai danau penyebrangan dan kereta api.

c. Seksi pengendalian operasional perhubungan udara, pos dan telekomunikasi.

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan udara serta kelancaran pelaksanaan kegiatan pos dan telekomunikasi lintas angkutan udara serta kelancaran pelaksanaan kegiatan pos dan telekomunikasi.

d. Seksi Penyuluhan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di bidang perhubungan.

9. Cabang Dinas

Cabang dinas merupakan unsure pelaksanaan teknis operasional dinas. Cabang dinas dipimpin oleh seorang Kepala

Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, cabang dinas mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan unsur teknis operasional
b. Melaksanakan urusan administrasi

Susunan organisasi cabang dinas terdiri dari :

a. Kepala cabang dinas
b. Unsur lini petugas teknis operasional
c. Unsur staf petugas administrasi
d. Kelompok jabatan fungsional

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit pelaksana teknis dinas lalu lintas angkutan jalan kota Palembang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di stu atau beberapa wilayah kecamatan atau satu daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya,unit pelaksanaan teknis dinas mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya.
b. Pelaksanaan urusan administrasi

Susunan organisasi unit pelaksana teknis dinas terdiri dari

a. Kepala dinas

b. Unsur lini/ petugas teknis operasional

c. Unsur staf/ petugas administrasi

11. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok jabatan fungsional di dalam lingkungan dinas daerah mempunyai togas melakukan kegiatan teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

b. Kelompok jabatan fungsional dapat ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

d. Pembinaan terhadap tenaga fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada kepala dinas dan kepala unit pelaksana teknis dinas yang bersangkutan.

## B. Pembahasan

**Analisis Mekanisme Pemungutan Retribusi Terminal Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

Dalam bab ini akan membahas permasalahan yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan yaitu Analisis Mekanisme Pemungutan Retribusi Terminal Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dan Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Daerah.

### 1. Mekanisme Pemungutan Retribusi Terminal

Pemungutan Retribusi Terminal tidak boleh diborongkan. Retribusi Terminal dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Adapun mekanisme pemungutan retribusi terminal Pemerintah Kota Palembang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Palembang yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Mekanisme Pemungutan Retribusi Terminal yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Palembang adlah sebagai berikut :

a. Penetapan Retribusi

Penetapan retribusi berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dalam hal ini jika SKRD tidak dipenuhi untuk wajib retribusi serta penentuan tarif retribusi ditetapkan walikota, apabila berdasarkan hasil pemerikasaan ditemui data baru atau yang semua belum terungkap maka dikeluarkan SKRD tambahan.

b. Pemungutan Retribusi

Retribusi Terminal dipungut dengan menggunakan karcis retribusi, yang mana setiap mobil angkutan umum yang memasuki terminal diberi karcis pembayaran retribusi dan melakukan pembayaran retribusi sebesar tarif yang diberlakukan dalam PERDA (Peraturan Daerah). Setiap mobil yang sudah membayar retribusi akan dicatat, yang mana tujuannya untuk mengawasi beberapa kali mobil tersebut memasuki terminal.

c. Penagihan Retribusi

Surat peringatan dikeluarkan apabila mobil angkutan umum tidak memasuki terminal. Surat peringatan tersebut dikeluarkan setelah tujuh hari sejak tempat pembayaran, dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

d. Penyetoran Retribusi

Retribusi Terminal yang terkumpul dipegang oleh bendaharawan terminal kemudian disetorkan kepada bendahara penerima Dinas Perhubungan, dan kemudian bendahara Dinas Perhubungan menyetor seluruh retribusi ke Bank Sumsel Melalui rekening Pemerintah Kota Palembang sehari setelah penagihan retribusi.

e. Pembukuan dan Pelaporan

Pembukuan dilakukan sebagai bukti pelaporan bahwa jumlah retribusi yang disetorkan sama besarnya dengan jumlah karcis pembayaran retribusi.

**2. Pendapatan Asli Daerah**

Pemerintah bersama Dinas Perhubungan harus memperhatikan konsep *Value For Money* dalam menyusun suatu anggaran agar target yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

1. Tingkat Efektifitas

Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atay apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Berikut Indikator Tingkat Efektifitas :

- Anggaran Pendapatan

  Anggaran Pendapatan adalah estimasi atas penerimaan dan pengeluaran yang akan dikeluarkan untuk memperoleh manfaat ekonomis yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan atau sektor publik di masa yang akan datang.

- Realisasi Pendapatan

  Realisasi Pendapatan adalah target nyata tingkat pencapaian untuk memperoleh manfaat ekonomis yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan atau sektor publik.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas suatu perusahaan atau sektor publik dengan membandingkan data-data anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan dikalikan 100 %.

Berikut Kriteria Efektifitas :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100 % ( x < 100 % ) berarti efektif.
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100 % ( x = 100 % ) berarti efektifitas berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100 % ( x > 100 % ) berarti tidak efektif

Tingkat efektifitas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan di 9 Terminal dari tahun 2006 – 2009 adalah sebagai berikut :

a. Tahun 2006

Tingkat Efektifitas

$$\frac{\text{Rp } 2.000.000.000}{\text{Rp } 1.405.754.200} \times 100\ \% = 142{,}27\ \%$$

Berdasarkan persentase dari tingkat efektifitas Dinas Perhubungan Kota Palembang pada tahun 2006 yaitu sebesar 142,27 % , berarti pengukuran kinerjanya adalah tidak efektif

b. Tahun 2007

Tingkat Efektifitas

$$\frac{\text{Rp } 2.000.000.000}{\text{Rp } 1.214.690.850} \times 100\ \% = 164{,}65\%$$

Berdasarkan persentase dari tingkat efktifitas Dinas Perhubungan Kota Palembang pada tahun 2007 yaitu sebesar 164,65 %, berarti pengukuran kinerjanya adalah tidak efektif

c. Tahun 2008

Tingkat Efektifitas

$$\frac{\text{Rp } 2.250.000.000}{\text{Rp } 1.239.446.700} \times 100\ \% = 181{,}53\ \%$$

Berdasarkan persentase dari tingkat efktifitas Dinas Perhubungan Kota Palembang pada tahun 2008 yaitu sebesar 181,53 % ,berarti pengukuran kinerjanya adalah tidak efektif

d. Tahun 2009

Tingkat Efektifitas

$$\frac{\text{Rp } 2.500.000.000}{\text{Rp } 1.379.046.450} \times 100\ \% = 181{,}28\ \%$$

Berdasarkan persentase dari tingkat efktifitas Dinas Perhubungan Kota Palembang pada tahun 2008 yaitu sebesar 181,28 % ,berarti pengukuran kinerjanya adalah tidak efektif

# BAB V

# SIMPULAN DAN SARAN

## A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan pelaksanaan Mekanisme Pemungutan Retribusi Terminal Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang pada Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah sebagai berikut :

### 1. Mekanisme Pemungutan Retribusi Terminal

Pemungutan Retribusi Terminal tidak boleh diborongkan. Retribusi Terminal dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Adapun mekanisme pemungutan retribusi terminal Pemerintah Kota Palembang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Palembang yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Mekanisme Pemungutan Retribusi Terminal yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Palembang adlah sebagai berikut :

a. Penetapan Retribusi

Penetapan retribusi berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), dalam hal ini jika SKRD tidak dipenuhi untuk wajib retribusi serta penentuan tarif retribusi ditetapkan walikota, apabila berdasarkan hasil pemerikasaan ditemui data baru atau yang semua belum terungkap maka dikeluarkan SKRD tambahan.

b. Pemungutan Retribusi

Retribusi Terminal dipungut dengan menggunakan karcis retribusi, yang mana setiap mobil angkutan umum yang memasuki terminal diberi karcis pembayaran retribusi dan melakukan pembayaran retribusi sebesar tarif yang diberlakukan dalam PERDA (Peraturan Daerah). Setiap mobil yang sudah membayar retribusi akan dicatat, yang mana tujuannya untuk mengawasi beberapa kali mobil tersebut memasuki terminal.

c. Penagihan Retribusi

Surat peringatan dikeluarkan apabila mobil angkutan umum tidak memasuki terminal. Surat peringatan tersebut dikeluarkan setelah tujuh hari sejak tempat pembayaran, dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

d. Penyetoran Retribusi

Retribusi Terminal yang terkumpul dipegang oleh bendaharawan terminal kemudian disetorkan kepada bendahara penerima Dinas Perhubungan, dan kemudian bendahara Dinas Perhubungan menyetor seluruh retribusi ke Bank Sumsel Melalui rekening Pemerintah Kota Palembang sehari setelah penagihan retribusi.

e. Pembukuan dan Pelaporan

Pembukuan dilakukan sebagai bukti pelaporan bahwa jumlah retribusi yang disetorkan sama besarnya dengan jumlah karcis pembayaran retribusi.

**2. Pendapatan Asli Daerah**

Pemerintah bersama Dinas Perhubungan harus memperhatikan konsep *Value For Money* dalam menyusun suatu anggaran agar target yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

1. Tingkat Efektifitas

Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atay apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Berikut Indikator Tingkat Efektifitas :

- Anggaran Pendapatan

  Anggaran Pendapatan adalah estimasi atas penerimaan dan pengeluaran yang akan dikeluarkan untuk memperoleh manfaat ekonomis yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan atau sektor publik di masa yang akan datang.

- Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan adalah target nyata tingkat pencapaian untuk memperoleh manfaat ekonomis yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan atau sektor publik.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas suatu perusahaan atau sektor publik dengan membandingkan data-data anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan dikalikan 100 %.

'Berikut Kriteria Efektifitas :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100 % ( x < 100 % ) berarti efektif.
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100 % ( x = 100 % ) berarti efektifitas berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100 % ( x > 100 % ) berarti tidak efektif.

## B. Saran

Didalam pelaksanaan Mekanisme Pemungutan Retribusi Terminal disarankan Kepada Dinas Perhubungan Kota Palembang untuk dapat :

1. Pemerintah juga harus memperhatikan sarana dan prasarana yang ada pada terminal karena hal tersebut sangat signifikan bagi kenyaman masyarakat yang memanfaatkan fasilitas tersebut, dan itu merupakan pondasi untuk tercapainya target yang ditetapkan.
2. Hendaknya Pemerintah dalam membuat peraturan, bertindak lebih tegas bagi masyarakat yang melanggar peraturan.

3. Dalam menetapkan tarif retribusi hendaknya Pemerintah memikirkan dan menimbang dengan kemampuan masyarakat dalam membayar retribusi yang akan ditetapkan, sehingga menimbulkan sikap keadilan bagi semua pihak.
4. Lebih di tingkatkan lagi pengawasan di terminal, sehingga tidak akan ada lagi mobil umum yang tidak memasuki terminal, dan tidak ada lagi mobil pribadi yang mengangkut penumpang.

## DAFTAR PUSTAKA


Mardiasmo. 2002. **Perpajakan.** Edisi Revisi Tahun 2001. Penerbit Andi, Yogyakarta

Marihot P. Siahaan.2005. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Grafindo.** Jakarta.

M. Rusdi (2007). **"Analisis Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang"** (Tidak Dipublikasikan).

M. Suparmoko.2001. **Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah.** Edisi Pertama, Andi Yogyakarta. Yogyakarta.

Nan Lin dalam buku W.Gulo.2002. Metode Penelitian, penerbit PT. Grasindo. Jakarta.

Nur Indriantoro dan Bambang Soepomo, 2002. **Metode Penelitian, BPFE,** Yogyakarta.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang **Retribusi Terminal**.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 Tahun 2001 Tentang **Objek Retribusi.**

Soeretno dan Lin Colin Arsyad, 2003. **Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi Revisi Cetakan Keempat, UPP AMP YKPN,** Yogyakarta.

Supardi, 2005. **Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Edisi Pertama, UII Press,** Yogyakarta.

Susilo dan Halim.2002 **Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah.** Universitas GAJAHYANA. Malang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang **Peraturan Daerah.**

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan 2004. Tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

| | | | |
|---|---|---|---|
| IA MAHASISWA : | ZULFA NANDA SARI | PEMBIMBING | : MIZAN, SE. M.Si. AK |
| : | 22 2007 258 K | KETUA | : |
| JSAN : | AKUNTANSI | ANGGOTA | : |

JL SKRIPSI : ANALISIS MEKANISME PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG

| TGL / BL / TH KONSULTASI | MATERI YANG DIBAHAS | PARAF PEMBIMBING | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | KETUA | ANGGOTA | |
| 23/2 -2010 | Bab I, II, III | | | Perbaiki sesuai saran |
| 24/2 -2010 | Bab I, II, III | | | Acc lanjut bab IV |
| 26/2 -2010 | Bab IV | | | Perbaiki sesuai saran. |
| 27/2 -2010 | Bab IV | | | Acc lanjut bab V |
| 28/2 -2010 | Bab V | | | Acc U/ujian |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ATAN

siswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, an terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : 23 08 2010

an. Dekan

Ketua Jurusan,

# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
# DINAS PERHUBUNGAN

**Jalan Pangeran Sido Ing Lautan 35 Ilir Telp. 0711 442547 PALEMBANG**

Palembang, 26 Agustus 2010

Nomor : 551/ 1445 /DISHUB/2010
Sifat : Biasa
Perihal : Selesai Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Univ. Muhammadiyah Plg
di-
Palembang

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : 09/G-17/FE-UMP/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 Perihal mohon bantuan data, dengan ini dilaporkan bahwa :

Nama : Zulfa Nanda Sari

NIM : 22 2007 258

Jurusan : Akuntansi

*Telah selesai melakukan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota* Palembang.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**
**KOTA PALEMBANG**

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PERHUBUNGAN

**MASRIPIN, SE, M.Si**
**Pembina Tk. I**
**NIP. 19590213 198003 1 002**

# FAKULTAS EKONOMI
# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

**194/J-10/FE-UMP/SHA/II/2010**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

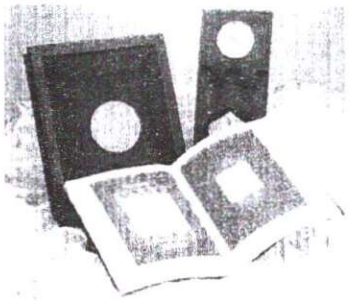

**DIBERIKAN KEPADA :**

**NAMA : ZULFA NANDA SARI**
**NIM : 222007258.K**
**JURUSAN : Akuntansi**

Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
**Dengan Predikat MEMUASKAN**

Palembang, 02 Februari 2010

*Unggul dan Islami*

an. Dekan
Pembantu Dekan IV

Drs. Antoni

# BIODATA PENULIS

| | |
|---|---|
| Nama | : Zulfa Nanda Sari |
| NIM | : 22 2007 258 K |
| Jurusan | : Akuntansi |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : Palembang, 14 Juli 1986 |
| Agama | : Islam |
| No HP | : 0852-67999654 |
| Alamat | : Jl. Baung II / V No.267 Rt. 15 Rw.05 |
| | Perumnas Sako Kenten Palembang 30163 |

Nama Orang Tua :

- Ayah : Awaluddin C.R
- Ibu : Cholifah B.T

Pekerjaan Orang Tua :

- Ayah : Karyawan PDAM Tirta Musi Palembang
- Ibu : Rumah Tangga